

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset berharga bagi keberlangsungan suatu bangsa. Mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas serta berdaya saing dalam pembangunan nasional merupakan bentuk investasi jangka panjang. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai aspek, seperti kesehatan, pendidikan, pola asuh, serta regulasi hukum yang melindungi hak-hak anak. Komitmen pemerintah terhadap isu perlindungan anak tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Regulasi ini mendefinisikan anak sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Selain itu, perlindungan anak dijelaskan sebagai “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sayangnya, masih terdapat sejumlah anak di Indonesia yang menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan hak-hak mereka maupun dalam memperoleh perlindungan yang layak. Berdasarkan Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang

dipublikasikan dalam Buku Profil Anak Indonesia 2024. Berikut merupakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak di Indonesia. Rata-rata kepemilikan KIA di Indonesia hanya 53,38 persen sedangkan 46,62 persen lainnya belum memiliki. KIA merupakan dokumen penting, masih ada hampir separuh dari populasi anak yang belum memiliki akses atau kesadaran untuk mendapatkan KIA.

Stunting tetap menjadi permasalahan kesehatan yang signifikan di Indonesia. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan kognitif serta kapasitas kerja dalam jangka panjang akibat pertumbuhan otak yang tidak maksimal. Tingkat prevalensi stunting di Indonesia masih belum mencapai target penurunan sebesar 14 persen pada tahun 2024. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, angka stunting di Indonesia tercatat sebesar 21,5 persen.

Permasalahan lainnya yang saat ini juga menjadi prioritas pemerintah adalah perkawinan anak. Istilah ini merujuk pada ikatan pernikahan yang melibatkan individu yang masih berusia di bawah 18 tahun. Perkawinan anak merupakan masalah serius yang melanggar hak anak dan berdampak buruk pada kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka. Faktor sosial budaya, kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan anak. Presentase tahun 2020 perkawinan anak adalah 10,35% dan 2023 adalah 6,92% terjadi penurunan persentase perempuan 20 – 24 tahun yang menikah

sebelum berumur 18 tahun. Meskipun persentasenya turun, laju penurunannya secara rata-rata hanya berkisar 1 persen sehingga tetap perlu upaya pencegahan perkawinan anak dengan mengendalikan terjadinya permohonan dispensasi perkawinan. Hingga saat ini pemerintah masih mendeteksi adanya perkawinan anak yang diajukan dan dikabulkan dikarenakan anak mengalami kehamilan. Padahal, kehamilan usia anak dapat meningkatkan risiko anak lahir stunting, masalah kesehatan lainnya, hingga kematian.

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak (KtA) mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2023 jumlah kasus KtA mencapai 18.175 kasus yang mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebanyak 16.106 kasus. Sedangkan untuk tren jumlah korban KtA juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data yang tercatat di Simfoni PPA, pada tahun 2023 jumlah korban KtA mencapai 20.221 korban yang mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebanyak 17.641 korban.

Mengingat kompleksitas berbagai aspek kehidupan anak di Indonesia, maka pemenuhan hak serta perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya. Upaya ini dapat diwujudkan melalui integrasi hak anak ke dalam setiap aspek pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Proses ini mencakup penyusunan regulasi, kebijakan, program, serta kegiatan yang berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Pendekatan tersebut dikenal sebagai Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) (Kemen PPPA, n.d).

Sejak tahun 1996, UNICEF bersama UN-Habitat telah mengembangkan inisiatif *Child Friendly Cities Initiative* (CFCI) sebagai bentuk dukungan bagi pemerintah kota dalam merealisasikan pemenuhan hak-hak anak di tingkat lokal, dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak sebagai dasar utama. Dalam hal ini, keterkaitan antara Prinsip Utama Hak Anak (PUHA) dan CFCI terletak pada tujuan bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, layak, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Di Indonesia, Konvensi Hak Anak telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menuntut langkah-langkah konkret dalam implementasinya guna memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal.

Untuk mendorong percepatan dan optimalisasi implementasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di seluruh tingkatan pemerintahan, Indonesia perlu merumuskan langkah-langkah strategis. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Secara khusus, pemerintah kabupaten/kota memiliki peran yang sangat fundamental, mengingat kedekatannya dengan masyarakat dalam menjalankan pelayanan publik. Kebijakan terkait pengembangan KLA telah diatur dalam sejumlah regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KLA merupakan suatu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak anak serta memberikan perlindungan khusus bagi anak melalui sistem yang dirancang secara terencana, holistik, dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Untuk mengukuhkan komitmen tersebut, diperlukan adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan KLA. Pembangunan KLA bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata, tetapi juga membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk lembaga masyarakat, sektor swasta, dan media. Kepedulian serta kesadaran pemerintah daerah terhadap isu-isu yang berkaitan dengan anak semakin meningkat, terutama seiring dengan masih rendahnya kualitas hidup anak dan maraknya kasus yang melibatkan anak di berbagai wilayah.

Konsep Kota Layak Anak pertama kali diperkenalkan oleh UNICEF bersama UN-HABITAT dalam sesi khusus Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anak (UN-GASS) pada tahun 2002, yang menegaskan komitmen terhadap *World Fit for Children*. Kebijakan ini awalnya dirancang di tingkat pusat, namun implementasi dan pengembangannya kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak di tingkat kabupaten atau kota. Mengacu pada regulasi mengenai pemenuhan hak-hak anak, Pemerintah Kota Tegal melaksanakan implementasi peraturan pemerintah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan hak anak melalui kebijakan khusus yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung upaya pengembangan kapasitas pada perempuan dan anak. Dalam hal ini, perkembangan anak mencakup berbagai aspek perubahan yang terjadi, baik dalam ranah fisik, kognitif, emosional, maupun psikososial (Bardja, 2017:112-122).

Kolaborasi berbagai pihak diperlukan dalam upaya melindungi serta memenuhi hak-hak anak guna menciptakan lingkungan yang ramah dan layak bagi mereka. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan hak anak dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 pada 25 Agustus, yang kemudian diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 5 September tahun yang sama. Melalui ratifikasi ini, pemerintah menegaskan bahwa seluruh hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang fundamental. Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah berupaya untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak tersebut. Konvensi ini lahir dari kesadaran akan kerentanan anak yang secara kodrati bergantung pada orang dewasa, memiliki kepolosan, serta memerlukan perhatian dan perlindungan khusus, baik dari segi fisik maupun mental (Fitriani, 2016: 250-258).

Landasan konsep Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) terletak dalam upaya mengadaptasi Konvensi Hak Anak dari aspek implementasi nyata dalam bentuk strategi dan intervensi pembangunan. Hal ini terjadi

melalui penerapan kebijakan, program, serta berbagai kegiatan dalam tingkat kabupaten/kota yang semuanya diarahkan pada pemenuhan hak-hak anak. Secara umum, tujuan dari Kota Layak Anak adalah mewujudkan prakarsa pemerintah daerah yang mentransformasikan kerangka hukum hak-hak anak menjadi unsur-unsur yang nyata, meliputi kebijakan, kelembagaan, program, dan kegiatan pembangunan, dengan fokus pada pemenuhan hak-hak anak di suatu kabupaten/kota (Faisea & Dan, 2020).

Pemerintah Indonesia telah merancang berbagai strategi dalam upaya melindungi hak-hak anak di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011. Strategi tersebut merupakan suatu fasilitas bersama yang berorientasi pada pencapaian tujuan jangka panjang (David, 2011:18-19). Konsep Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merujuk pada daerah yang menerapkan sistem pembangunan berbasis pemenuhan hak anak dengan mengintegrasikan sumber daya serta komitmen dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Proses ini dirancang secara komprehensif dan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan, program, serta kegiatan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA, terdapat lima klaster utama hak anak, yaitu

1. Hak sipil dan kebebasan,

2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
3. Kesehatan dasar kesejahteraan dan,
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu senggang dan kegiatan seni budaya,
5. Perlindungan khusus.

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) bertujuan untuk mendorong inisiatif pemerintah daerah dalam mengintegrasikan konsep hak anak ke dalam berbagai program, kebijakan, maupun kegiatan. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal di tingkat kabupaten atau kota (Saputra, 2019:26). Dalam implementasinya, apresiasi terhadap pelaksanaan KLA diberikan melalui lima tingkatan penghargaan, yakni: 1) KLA, 2) Utama, 3) Nidya, 4) Madya, dan 5) Pratama. Pemerintah daerah di Indonesia terus berupaya mengembangkan KLA sebagai bagian dari visi mewujudkan Indonesia Layak Anak pada tahun 2030.

Evaluasi terhadap Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dilakukan oleh tim independen yang terdiri atas para ahli di bidang perlindungan anak serta perwakilan dari berbagai kementerian atau lembaga, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Sekretariat Negara (Setneg), Kantor

Staf Presiden (KSP), serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Proses penilaian ini mencakup empat tahapan utama, yakni: (1) penilaian mandiri, (2) verifikasi administrasi, (3) verifikasi lapangan, dan (4) tahap finalisasi. Selain itu, penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kluster yang telah ditetapkan:

- a. Aspek kelembagaan memperoleh skor sebesar 150
- b. Klaster pertama, yang mencakup hak sipil dan kebebasan, memiliki skor sebesar 135
- c. Klaster kedua, yang meliputi lingkungan keluarga serta pengasuhan alternatif, memperoleh skor sebesar 205
- d. Klaster ketiga, yang berfokus pada kesehatan dasar dan kesejahteraan, memiliki skor sebesar 185
- e. Klaster keempat, yang mencakup pendidikan, pemanfaatan waktu luang, serta kegiatan budaya, memperoleh skor sebesar 110
- f. Klaster kelima, yang berkaitan dengan perlindungan khusus, memiliki skor sebesar 215

Dalam setiap klaster penilaian, hasil evaluasi akan diakumulasi, dan apabila seluruh indikator telah terpenuhi, maka total skor yang dapat dicapai adalah 1000. Setelah proses penilaian selesai, penghargaan akan diberikan berdasarkan kategori yang telah ditetapkan:

- a. Kategori pratama dengan skor 501-600
- b. Kategori madya dengan skor 601-700
- c. Kategori nindya dengan skor 701-800
- d. Kategori utama dengan skor 801-900
- e. Kategori KLA dengan skor 901-1000

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada tahun 2023, sebanyak 360 Kabupaten/Kota menerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak. Penghargaan tersebut diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yakni 19 Kabupaten/Kota dalam kategori Utama, 76 dalam kategori Nindya, 130 dalam kategori Madya, dan 135 dalam kategori Pratama. Selain itu, Penghargaan Provinsi Layak Anak (PROVILA) juga diberikan kepada 14 Provinsi yang telah menunjukkan komitmen dan upaya signifikan dalam mendorong Kabupaten/Kota di wilayahnya untuk mengimplementasikan program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Tabel 1.1

Data predikat KLA di Jawa Tengah Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Predikat	No.	Kabupaten/Kota	Predikat
1.	Kabupaten Banjarnegara	Madya	19.	Kabupaten Pemalang	Nindya
2.	Kabupaten Banyumas	Pratama	20.	Kabupaten Purbalingga	Madya
3.	Kabupaten Batang	Madya	21.	Kabupaten Purworejo	Pratama
4.	Kabupaten Blora	Madya	22.	Kabupaten Rembang	Nindya
5.	Kabupaten Boyolali	Nindya	23.	Kabupaten Semarang	Pratama
6.	Kabupaten Brebes	Nindya	24.	Kabupaten Sragen	Utama
7.	Kabupaten Cilacap	Nindya	25.	Kabupaten Sukoharjo	Madya
8.	Kabupaten Demak	Madya	26.	Kabupaten Temanggung	Madya
9.	Kabupaten Grobogan	Madya	27.	Kabupaten Wonogiri	Madya
10.	Kabupaten Jepara	Pratama	28.	Kabupaten Wonosobo	Madya
11.	Kabupaten Karanganyar	Madya	29.	Kabupaten Tegal	Nindya
12.	Kabupaten Kendal	Pratama	30.	Kota Magelang	Nindya
13.	Kabupaten Kebumen	Madya	31.	Kota Pekalongan	Nindya
14.	Kabupaten Klaten	Nindya	32.	Kota Salatiga	Madya
15.	Kabupaten Kudus	Pratama	33.	Kota Semarang	Utama
16.	Kabupaten Magelang	Nindya	34.	Kota Surakarta	Utama
17.	Kabupaten Pati	Madya	35.	Kota Tegal	Nindya
18.	Kabupaten Pekalongan	Madya			

Salah satu wilayah yang telah menunjukkan komitmennya dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) adalah Kota Tegal. Kota ini termasuk di antara 23 kota atau kabupaten yang berhasil meraih penghargaan KLA dengan kategori peringkat Nindya. Terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Tegal telah mengambil langkah konkret dalam memenuhi kewajibannya terhadap pemenuhan hak-hak anak. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemerintah Kota Tegal menetapkan dasar kebijakan perlindungan hak anak melalui Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Regulasi ini menguraikan upaya pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak anak secara menyeluruh, termasuk perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, serta penelantaran, dengan pendekatan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.

Tabel 1.2

Predikat Kota Layak Anak di Kota Tegal

	2019	2020	2021	2022	2023
Predikat Kota Layak Anak di Kota Tegal	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya

Walaupun telah mencapai predikat Nindya, Kota Tegal masih memiliki permasalahan dan hambatan untuk mencapai keberlangsungan

hak anak. Seperti dalam ranah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, program pendaftaran penduduk mencakup persentase anak berusia 0 hingga kurang dari 17 tahun satu hari yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Pada tahun 2023, cakupan kepemilikan KIA di kalangan anak-anak dalam rentang usia tersebut masih belum mencapai angka maksimal 100%, meski Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal sudah menjalankan upaya-upaya maksimal dari mulai jemput bola layanan administrasi kependudukan sampai ke tingkat RT/RW dengan menggunakan Motor Tossa “Layanan Adminduk”, jemput bola ke PAUD, TK dan SD juga SMP, serta upaya maksimal untuk menerapkan layanan administrasi kependudukan secara digital maupun secara manual. Penyebab mengapa program tersebut belum bisa tercapai sepenuhnya karena belum optimalnya penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk individu yang berada dalam rentang usia 0 hingga 16 tahun.

Pada 2024, angka pernikahan dini di Kota Tegal mengalami penurunan bila dibandingkan dua tahun sebelumnya. Meski demikian, pernikahan yang terjadi pada usia muda dengan rata-rata umur 15-18 tahun itu masih ada dan dipicu karena hamil duluan. Angka pernikahan dini dengan usia rata-rata 15-18 tahun itu masih ada dan dipicu karena hamil duluan. Jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Tegal berjumlah 55. Kemudian di 2023 berjumlah 31. Sementara pada 2024 hingga memasuki Juli ini, jumlahnya hanya ada 11 kasus. Meskipun angka pernikahan dini di Kota Tegal menurun, jumlahnya masih tergolong tinggi.

Pada program pelayanan kesehatan Berdasarkan RPJMD Kota Tegal tahun 2019-2024 salah satu tantangan utama dalam sektor kesehatan di Kota Tegal adalah masih adanya kasus gizi buruk dan stunting pada balita. Prevalensi stunting di wilayah tersebut tercatat sebesar 22,3 persen, yang menunjukkan bahwa target penurunan hingga 14 persen belum tercapai. Di sisi lain, tingkat inflasi tahunan hingga Agustus 2024 mencapai 2,13 persen. Sementara itu, laju inflasi tahunan hingga Agustus 2024 tercatat sebesar 2,13 persen. Kondisi ini disebabkan masih adanya beberapa aspek layanan intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi 14angkah1414 yang kondisinya masih belum optimal..

Di bidang pendidikan pemerintah Kota Tegal melaksanakan program Sekolah Ramah Anak yang dimana sekolah berperan sebagai lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dalam menjalani proses pembelajaran dan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan seluruh warga sekolah menjadi aspek krusial dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif. Tetapi pemerintah tidak memberikan fasilitas untuk menjalankan program tersebut dan masih adanya kasus bullying yang dilakukan oleh antar siswa.

Persentase kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, angka tersebut mencapai 14,58 persen, kemudian mengalami kenaikan lebih lanjut pada tahun 2023 hingga mencapai 15,94 persen. Sementara itu, pada tahun 2023 ada 35 kasus

Adapun kasus yang ditangani yaitu kasus penelantaran sebanyak 1 orang, kasus seksual sebanyak 7 orang, kasus psikis 1 orang dan kasus kekerasan fisik sebanyak 13 orang. Kekerasan dapat terjadi akibat berbagai faktor, di antaranya minimnya pemahaman serta kesadaran terhadap hukum, kondisi ekonomi yang kurang memadai, dugaan keterlibatan dalam perselingkuhan, serta praktik pernikahan pada usia dini.

Berdasarkan data-data diatas, Kota Tegal mendapat pengakuan atas komitmennya dalam menerapkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan upayanya yang patut diperhatikan pada perlindungan anak. Meskipun begitu, tantangan-tantangan besar seperti tingginya kasus kekerasan terhadap anak telah menghambat keberhasilan pelaksanaan program perlindungan anak di wilayah Tegal. Untuk mencapai tujuannya, Kota Tegal perlu melakukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kuat, memastikan pemenuhan hak-hak anak dan implementasi Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak secara efektif.

Dalam upaya mendalami konteks inisiatif ramah anak yang lebih luas, Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan strategi pembangunan tingkat kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha, swadaya masyarakat, dan swadaya masyarakat (Ratnasari, 2020). Pendekatan perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan ini melibatkan program atau kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak. Konsep Kabupaten/Kota Ramah Anak (KLA) memperluas angka

pembangunan ini pada satu wilayah, mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara komprehensif dan berkelanjutan untuk program dan kegiatan (Suryani, 2017).

Strategi penting untuk menerapkan kota ramah anak adalah dengan mengarusutamakan hak-hak anak ke dalam semua tahap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Hal ini dimulai dari perencanaan dan meluas melalui penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, semuanya berpedoman pada prinsip-prinsip hak-hak anak. Pendekatan ini menjamin upaya yang komprehensif dan terpadu untuk menciptakan lingkungan di mana hak-hak anak diprioritaskan dan ditegakkan dalam setiap aspek pembangunan perkotaan (Saputri & Erowati, 2020).

Strategi pengembangan perlindungan sangat penting dalam mengatasi tantangan yang ada dan menjamin efektivitas pelaksanaan kegiatan ramah anak di Kota Tegal. Kota dapat memberikan landasan bagi pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan undang-undang yang melindungi hak-hak anak, terutama di wilayah yang rentan terhadap kesenjangan gender dan kekerasan. Langkah-langkah ini harus mencakup 10 kerangka praktis yang mendukung kesejahteraan fisik dan emosional anak-anak, menciptakan lingkungan yang memungkinkan mereka untuk berkembang dan terlibat secara aktif dalam komunitas mereka. Dalam mencapai tujuan menciptakan Kota Ramah Anak, penting untuk melakukan lebih dari sekedar mengikuti hukum pada pengembangan taktik yang memprioritaskan perlindungan anak. Hal ini dilakukan dengan mendorong

budaya yang menghargai rasa hormat, inklusivitas, dan keselamatan bagi setiap anak di Kota Tegal. Langkah-langkah ini dapat dimasukkan ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kota, memastikan pendekatan komprehensif yang memberikan prioritas pada realisasi hak-hak anak. Dengan mengambil langkah ini, Kota Tegal dapat menjadi model bagi daerah lain, mendorong perubahan yang lebih luas di mana hak-hak anak lebih diutamakan dan dilindungi dalam proyek pembangunan perkotaan.

Hasil penelitian terdahulu oleh Irma Rumtianing (2016) menunjukkan hasil berbagai kegiatan yang penting dalam penerapan kota layak anak. Inisiatif tersebut antara lain dengan mendirikan forum anak Ponorogo, melakukan inspeksi sekolah, membangun taman kota, dan memberikan jaminan khusus bagi anak-anak (Rumtianing, 2016). Kemudian penelitian lain oleh Darmini Roza dan Laurensius Arliman (2018) menekankan pentingnya kontribusi Pemerintah Daerah untuk melindungi anak-anak di Kota Layak Anak. Mereka menguraikan tindakan utama, meliputi integrasi pemenuhan hak-hak anak sebagai prioritas utama, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan cakupan dan aksesibilitas, pengembangan kolaborasi dan jejaring yang lebih luas, membina komunikasi, informasi, serta menerapkan sertifikasi dan apresiasi (Roza & Arliman, 2018).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2020) menggali implementasi praktis yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan ramah

anak, termasuk optimalisasi produksi akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KIA) gratis, serta penciptaan Taman dan Sekolah Ramah Anak. Strategi Pemkot Palangka Raya antara lain membentuk Tim Satgas KLA, mengumpulkan baseline data, menetapkan KLA, mengidentifikasi aktivitas dan permasalahan anak melalui dinas dan organisasi terkait, program kerja yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kota Pembangunan KLA, melaksanakan Kota Layak Anak program, dan melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya untuk menggali Strategi Pengembangan yang diterapkan dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Tegal. Dengan mengkaji pengalaman dan pendekatan yang digunakan di daerah lain, khususnya yang disebutkan dalam penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi efektif yang dapat disesuaikan dengan konteks spesifik Kota Tegal dan berkontribusi terhadap keberhasilan penerapan inisiatif ramah anak.

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penggunaan dan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi penduduk usia 0-16 tahun
2. Tingginya angka pernikahan dini di Kota Tegal

3. Angka stunting di Kota Tegal masih tinggi dan belum mencapai target.
4. Program Sekolah Ramah Anak belum didukung oleh fasilitas yang memadai dan masih adanya kasus bullying di lingkungan sekolah.
5. Tingginya kasus kekerasan terhadap anak (KDRT) di Kota Tegal

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari permasalahan tersebut, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi internal dan eksternal Kota Layak Anak di Kota Tegal?
2. Bagaimana strategi pengembangan yang dilakukan oleh Kota Tegal dalam mewujudkan Kota Layak Anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis internal dan eksternal pada pengembangan Kota Layak Anak di Kota Tegal
2. Untuk merumuskan strategi pengembangan pemerintah Kota Tegal dalam Mewujudkan Kota Layak Anak

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperluas, memperdalam, serta mengembangkan pemahaman peneliti mengenai konsep evaluasi dalam implementasi program kebijakan Pemerintah Kota Tegal yang berkaitan dengan pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak.
- b) Penelitian ini diharapkan sebagai langkah dalam mengekspresikan ide-ide dan temuan dari pemikiran dan penelitian peneliti, sesuai dengan aturan penulisan skripsi di Universitas Diponegoro.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Kota/Kabupaten Layak Anak. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi pengurus Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat membuat keputusan tentang kebijakan Pemerintah Kota Tegal.

- b) Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga bagi masyarakat dalam menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Tegal dalam upaya mengembangkan Kota Layak Anak.

3. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai sumber referensi yang bermanfaat bagi berbagai pihak serta menjadi bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya yang mungkin dilakukan oleh peneliti lain.

1.5 Kajian Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Metode & Teori	Tujuan	Hasil Penelitian
1	Puput Ratnasari/ 2020	Strategi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mewujudkan Kota Layak Anak	Metode penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi metode yang digunakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mewujudkan Kota Layak Anak dan apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan	Penelitian ini menemukan bahwa Kota Palangka Raya sangat berkomitmen untuk menjadi Kota Layak Anak. Ini ditunjukkan dengan keluarnya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Kebijakan ini bertujuan untuk membuat lingkungan

No.	Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Metode & Teori	Tujuan	Hasil Penelitian
				implementasi metode tersebut.	anak-anak aman. Pengoptimalan layanan administrasi kependudukan, seperti pemberian Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) secara gratis, dan pembangunan fasilitas yang ramah anak, seperti Taman Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak, adalah salah satu contoh upaya yang telah dilakukan. Pemerintah Kota Palangka Raya menggunakan berbagai pendekatan untuk mencapai program ini. Strategi-strategi ini

No.	Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Metode & Teori	Tujuan	Hasil Penelitian
					termasuk membentuk Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA), mengumpulkan data dasar, menetapkan indikator KLA, dan menemukan program dan masalah yang dihadapi anak-anak. Semua ini dilakukan dengan bekerja sama dengan SOPD, lembaga, dan organisasi terkait. Selanjutnya, pemerintah mengembangkan Rencana Aksi Kota untuk pengembangan KLA, melaksanakan berbagai

No.	Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Metode & Teori	Tujuan	Hasil Penelitian
					program terkait, dan memantau, menilai, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan.
2	Junaedi / 2019	Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar	Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan tipe penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis hasil menggunakan	Membahas tentang implemetasi kebijakan perlindungan khusus pada program kota layak anak di Kota Makassar	Hasil analisis mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Makassar, khususnya dalam aspek perlindungan khusus, telah berjalan secara merata. Meskipun demikian, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya.

No.	Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Metode & Teori	Tujuan	Hasil Penelitian
			analisis dari indikator yang diambil dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak berdasarkan klaster 5 tentang perlindungan khusus yaitu: Korban Kekerasan & Eksploitasi, Korban Pornografi &		

No.	Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Metode & Teori	Tujuan	Hasil Penelitian
			Situasi Darurat, Penyandang Disabilitas dan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), Terorisme, Stigma		
3	Febriana R, Aji Ratna, Dini Zulfiani / 2019	Studi Tentang Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Kota Layakanak Di Kota Sangatta Kabupaten Kutai Timur	Jenis penelitian yang digunakan adalah metode “Kualitatif Deskriptif”. Fokus penelitian yang diambil adalah perumusan	Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui manajemen strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta gugus tugas dalam mengembangkan Kabupaten/Kota Layak	Hasil penelitian mengenai pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah membentuk gugus tugas KLA serta menetapkan lima program prioritas. Program-program

No.	Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Metode & Teori	Tujuan	Hasil Penelitian
			kebijakan, pelaksanaan program, dan evaluasi program serta kendala dari pengembangan Kota Layak Anak di Kota Sangatta. Dalam penelitian ini key informan adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Kasubid	Anak di Kota Sangatta Kabupaten Kutai Timur. Selain itu juga untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Gugus Tugas dalam mewujudkan Kabupaten/kota Layak Anak di Kota Sangatta Kabupaten Kutai Timur	tersebut mencakup bidang pendidikan, penguatan kelembagaan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar, serta kesejahteraan. Kelima program ini telah diimplementasikan secara efektif oleh gugus tugas KLA guna mendukung terciptanya lingkungan yang ramah anak.

No.	Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Metode & Teori	Tujuan	Hasil Penelitian
			Kesejahteraan Sosial Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.		

No.	Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Metode & Teori	Tujuan	Hasil Penelitian
4	Nova Yovana / 2018	Perencanaan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Implementasi Kebijakan Pemangunan Kabupaten Layak Anak (KLA)	Menggunakan metode penelitian kualitatif	Meneliti perencanaan komunikasi pemerintah daerah	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada strategi perencanaan komunikasi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, dengan studi kasus yang berfokus pada implementasi kebijakan di Kabupaten Siak.
5	Sulistiowati,dkk/ 2018	Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Pringsewu	Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	Mendesripsikan implementasi kebijakan penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung	Temuan penelitian mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak masih belum mencapai tingkat optimal jika ditinjau

No.	Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Metode & Teori	Tujuan	Hasil Penelitian
					dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Meskipun telah ditetapkan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum utama di tingkat kabupaten, regulasi serta kebijakan turunan yang seharusnya mendukung implementasi peraturan tersebut masih belum tersedia secara memadai. Di antara variabel yang dianalisis, disposisi memiliki peran krusial sebagai faktor yang menghubungkan serta

No.	Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Metode & Teori	Tujuan	Hasil Penelitian
					memperkuat variabel lainnya dalam keberhasilan kebijakan Kabupaten Layak Anak.
6	Ahmad Saleh, dkk/ 2020	Pemetaan Kebutuhan Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak	Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, analitis, dan konseptual.	Menganalisis dan memetakan produk hukum daerah apa saja yang dapat mendorong upaya perwujudan kabupaten/kota layak anak.	Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perancangan peta jalan kebutuhan hukum daerah dalam mewujudkan kabupaten/kota yang ramah anak berlandaskan pada kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu,

No.	Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Metode & Teori	Tujuan	Hasil Penelitian
					kebijakan ini juga berakar pada regulasi sektoral mengenai perlindungan anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
7	Alexander Kate, et al / 2022	Bringing Dignity to the Assessment of Safety for Children who Live with Violence	Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif.	penelitian yang dilakukan di New South Wales (NSW) Australia untuk menentukan dampak pada persepsi praktisi perlindungan anak tentang keselamatan anak ketika pertanyaan Response-Based Practice (RBP)	Hasilnya menunjukkan bahwa memahami bagaimana perempuan mengelola kekerasan mengubah pandangan praktisi tentang perlindungan ibu dan keselamatan anak

No.	Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Metode & Teori	Tujuan	Hasil Penelitian
				digabungkan dengan penilaian keselamatan Structured Decision Making (SDM) standar NSW.	
8	I Nyoman S / 2019	Urgensi Peraturan Daerah Tentang Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Buleleng	Menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif	Agar perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dapat terwujud dengan baik di Kabupaten	Regulasi mengenai Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Buleleng didasarkan pada pijakan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam implementasinya, terdapat prinsip-prinsip mendasar yang harus dijunjung tinggi guna memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai

No.	Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Metode & Teori	Tujuan	Hasil Penelitian
					dengan tujuan yang diharapkan
9	Marit Janson, et.al / 2022	Child Friendly Environment- What, How and by Whom	Menggunakan metode deskriptif kualitatif, Teknik yang digunakan untuk literature review	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mensintesis konsep lingkungan ramah anak dan penggunaannya dalam literatur penelitian, untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam. pemahaman tentang kualitas sosio-fisik dan aktor yang mendukung realisasinya	"lingkungan ramah anak" dan serupa, tidak diklaim mencakup semua literatur yang mungkin relevan dengan subjek, dan formulasi termasuk "ramah remaja" dan "ramah remaja" secara otomatis.

No.	Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Metode & Teori	Tujuan	Hasil Penelitian
10	La Ode Muhammad / 2018	Rekomendasi Kebijakan Program Kota Layak Anak Di Kota Kendari	Menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Kota Layak Anak di kota tersebut Kendari	Kurangnya sinergi antara berbagai satuan tugas dalam mengimplementasikan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Kendari.
11	Ivan, Beu, & Van Hoof / 2020	Smart and age-friendly cities in Romania: An overview of public policy and practice	Analisis dokumen sekunder	Tujuan penelitian untuk mengetahui inisiatif terkini di tingkat lokal, regional, dan nasional yang menangani isu kota cerdas dan ramah usia di Rumania sedang diselidiki.	Konsep “kota pintar” di Rumania secara sempit didefinisikan sebagai peningkatan infrastruktur dan keberlanjutan. Beberapa program kota pintar mungkin membantu orang lanjut usia, namun hal

No.	Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Metode & Teori	Tujuan	Hasil Penelitian
					ini tidak diindikasikan. Inisiatif kontekstual di kota-kota kecil dan menengah memiliki elemen ramah usia. Rumania belum sepenuhnya menghubungkan tujuan kota cerdas dan ramah usia.
12	Brown, de Lannoy, McCracken, Gill, Grant, Wright & Williams / 2019	Child-friendly cities	Analisis literatur	Tujuan dari terbitan khusus ini adalah untuk menyatukan alur pembicaraan mengenai bukti, kebijakan, panduan, proses dan praktik terbaik; dan untuk membantu para praktisi, peneliti, dan	Pembentukan kota adalah tugas orang dewasa. Untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh agenda ini, kita memerlukan kebijakan, praktik, dan pendidikan serta pelatihan baru bagi semua profesi lingkungan binaan. Para

No.	Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Metode & Teori	Tujuan	Hasil Penelitian
				pengambil kebijakan dalam menghubungkan kesehatan anak dan kesehatan kota.	profesional di bidang perencanaan, kesehatan masyarakat, transportasi, lingkungan hidup, olah raga dan rekreasi, pendidikan, seni, dan budaya dapat menciptakan kota ramah anak. Untuk menciptakan komunitas ramah anak di mana pun, lembaga, dana, disiplin, dan peraturan harus terkoordinasi.
13	Van der Graaf, / 2020	The right to the city in the platform age: Child-friendly city and smart city	Analisis literatur	Artikel ini berusaha untuk mengembangkan gambaran kritis mengenai semakin meningkatnya peran	Gerakan kota pintar dan inisiatif CFC harus membawa aspek sosial, keseharian, dan ekonomi kota, teknologi, dan anak-

No.	Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Metode & Teori	Tujuan	Hasil Penelitian
		premises in contention		TIK di perkotaan dan wacana tata kelola perkotaan.	anak ke dalam dialog. Menggambarkan jaringan nilai ‘kekuasaan’ dalam pengelolaan kota membantu mengidentifikasi pemberi pengaruh dan pemimpin. Hal ini merupakan titik awal pendekatan multipihak berdasarkan bukti dan data yang melibatkan anak-anak dan komunitas di lingkungannya serta didukung oleh perubahan kebijakan, khususnya dalam perencanaan kota dan aliran pembiayaan.

No.	Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Metode & Teori	Tujuan	Hasil Penelitian
14	Suriastini, Buffardi, & Fauzan / 2019	What prompts policy change? Comparative analyses of efforts to create age-friendly cities in 14 cities in Indonesia.	Studi komparasi menggunakan literatur dan dokumen sekunder	Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang Mendorong Perubahan Kebijakan dan Analisis Komparatif Upaya Mewujudkan Kota Ramah Lanjut Usia di 14 Kota di Indonesia	Temuan menunjukkan bahwa penilaian AFC dapat menawarkan cara untuk melibatkan para pembuat kebijakan, yang pada gilirannya dapat memfasilitasi perubahan di tingkat kota, khususnya untuk kota-kota besar dengan anggaran yang lebih substantif dan kepemimpinan yang lebih terkonsolidasi dibandingkan dengan kepemimpinan yang tersebar; namun, tidak ada satu faktor pun yang

No.	Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Metode & Teori	Tujuan	Hasil Penelitian
					mewakili kondisi yang cukup atau diperlukan untuk perubahan.
15	van Hoof, & Marston / 2021	Age-friendly cities and communities: state of the art and future perspectives	Analisis literatur	Tujuan utama dari Edisi Khusus Feature Paper ini adalah untuk menilai secara kritis program Kota dan Komunitas Ramah Usia yang canggih.	Ada delapan domain kota ramah usia, khususnya partisipasi sosial, komunikasi dan informasi, partisipasi masyarakat dan lapangan kerja, perumahan, transportasi, dukungan masyarakat dan layanan kesehatan, ruang dan bangunan luar ruangan, serta rasa hormat dan inklusi sosial. Selain itu, Edisi Khusus Feature Paper ini juga mempertimbangkan

No.	Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Metode & Teori	Tujuan	Hasil Penelitian
					pentingnya (geron)teknologi dan solusi digital dalam kaitannya dengan lingkungan ramah usia.

Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan apabila perumusan strategi memiliki peran krusial dalam mewujudkan suatu program karena strategi berusaha untuk mengembangkan suatu daerah menjadi kabupaten/kota yang layak seperti Kota Tegal. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi yaitu internal antara lain kebijakan instansi, kinerja pegawai serta fasilitas atau sarana prasarana. Sedangkan faktor eksternalnya yakni partisipasi masyarakat, kerjasama antar stakeholder. Perlu dilakukannya strategi dalam mewujudkan kota layak anak karena akan menciptakan wilayah yang aman dan tentram untuk anak, sehingga anak dapat terlindungi dengan baik

Selain itu juga, kuatnya regulasi dan peran serta stakeholder yang sudah memahami penuh fungsi serta tujuan dari Kota Layak Anak sangat berpengaruh dalam mewujudkan KLA. Dari beberapa peneliti juga memiliki 2 metode dalam merumuskan strategi yakni metode kuantitatif dan kualitatif. Dari metode kuantitatif, terdapat beberapa strategi khususnya dalam penguatan faktor internal dan eksternal yang akan diterapkan untuk menangani permasalahan perlindungan ana dalam mewujudkan KLA.

1.5.2 Administrasi Publik

Secara etimologis, istilah *administrasi* berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas dua kata, yakni “ad” dan “ministrate,” yang memiliki makna “to serve” atau melayani dan memenuhi (Anggara, 2016:13). Dalam pengertian yang lebih sempit, administrasi merujuk pada proses penyusunan serta pencatatan data dan informasi secara sistematis guna menyediakan keterangan yang

dapat diakses kembali dengan mudah serta mempertahankan keterkaitan antar informasi yang ada. Dalam konteks ini, administrasi sering kali dikaitkan dengan tata usaha (*clerical work* atau *office work*). Sejalan dengan pandangan Munawardi Reksohadiprawiro (1984), administrasi dapat dipahami sebagai suatu sistem tata kelola yang tersusun secara rapi dan sistematis, mencakup pencatatan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pemahaman yang menyeluruh serta memperjelas keterkaitan antar fakta yang ada (Ulbert Silalahi, 2005).

Administrasi Publik, yang dalam bahasa Inggris disebut *Public Administration* atau dikenal pula sebagai Administrasi Negara, merupakan cabang ilmu sosial yang berfokus pada kajian terhadap tiga pilar utama dalam sistem pemerintahan, yakni lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Disiplin ini juga mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti kebijakan publik, manajemen sektor publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, serta prinsip etika yang mengatur tata kelola pemerintahan. Secara umum, administrasi publik dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas tentang mekanisme pengelolaan organisasi publik. Meskipun memiliki keterkaitan dengan ilmu manajemen dalam hal pengelolaan organisasi, administrasi publik memiliki cakupan yang berbeda. Jika ilmu manajemen lebih berorientasi pada pengelolaan organisasi di sektor

swasta, maka administrasi publik berfokus pada struktur dan dinamika organisasi publik atau pemerintahan. Hal ini mencakup institusi-institusi seperti kementerian, dinas-dinas pemerintahan, serta badan-badan administratif yang tersebar mulai dari tingkat daerah hingga nasional.

Dalam kajian administrasi publik, berbagai aspek penting turut menjadi perhatian, termasuk birokrasi, formulasi dan implementasi kebijakan publik, evaluasi program pembangunan, tata kelola pemerintahan daerah, serta konsep *good governance* yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan pandangan John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus, administrasi publik mencakup pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga perwakilan politik. Administrasi publik dapat dipahami sebagai suatu upaya koordinasi antara individu maupun kelompok dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Secara lebih luas, administrasi publik merupakan suatu proses yang berkaitan dengan penerapan kebijakan pemerintah, melibatkan berbagai teknik serta pendekatan yang kompleks guna mengarahkan dan mengoptimalkan upaya bersama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Prajudi Atmosudirdjo mendefinisikan administrasi publik sebagai sistem administrasi negara yang berfungsi dalam mengelola organisasi pemerintahan serta berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Di sisi lain, menurut Dwight Waldo, administrasi publik berfokus pada aspek manajerial dan organisasi yang melibatkan sumber daya manusia serta sarana pendukungnya dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintah secara efektif.

Nicholas Henry (2008: 8), sebagaimana dikutip dalam karya Deddy Mulyadi, mendefinisikan administrasi publik sebagai suatu perpaduan yang kompleks antara teori dan praktik, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pemerintahan dalam kaitannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas dan efisiensi. Menurut Chandler dan Plano (2008:3) dalam buku Deddy Mulyadi, administrasi publik merupakan suatu proses yang melibatkan pengorganisasian serta koordinasi sumber daya dan aparatur publik guna merumuskan, melaksanakan, serta mengelola keputusan dalam kebijakan publik. Sementara itu, menurut Woodrow Wilson (2012: 21) dalam buku yang ditulis oleh Wirman Syafri, administrasi publik diartikan sebagai kegiatan pemerintahan yang berorientasi pada

pelaksanaan tugas-tugas publik secara efisien, dengan tetap mempertimbangkan aspirasi serta preferensi masyarakat.

Penjelasan dari berbagai definisi administrasi publik menurut pendapat berbagai ahli menunjukkan jika administrasi publik merupakan kerja sama terorganisir dalam lingkup institusi publik, yang bertujuan untuk menangani permasalahan masyarakat melalui penyusunan serta implementasi kebijakan publik. Selain itu, administrasi publik juga mencakup pengelolaan yang efektif dalam sektor pemerintahan guna mencapai tujuan negara. Secara umum, esensi dari administrasi publik terletak pada upaya penyelenggaraan pembangunan serta pemberian layanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

1.5.3 **Paradigma Administrasi Publik**

Perkembangan kajian dan praktik administrasi publik di berbagai negara terus mengalami kemajuan seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh para administrator publik. Dinamika ini mendorong para teoritis untuk terus mengembangkan ilmu administrasi publik guna menyesuaikan diri dengan tantangan yang muncul. Sebagai disiplin ilmu yang bersifat dinamis, administrasi publik mengalami berbagai perubahan dan inovasi dari waktu ke waktu agar tetap relevan dengan kondisi yang ada. Paradigma dalam administrasi publik berfungsi sebagai kerangka konseptual yang digunakan oleh para ahli untuk

menganalisis dan menjelaskan perkembangan ilmu ini, serta sebagai perspektif dalam memahami fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks ini, terdapat enam paradigma administrasi publik yang akan diuraikan sebagai berikut.

Paradigma pertama ada Dikotomi Politik/Administrasi 1900-1926. Pada abad ke-19 para ahli administrasi seperti Frank Goodnow (*Politics and Administration*, 1900), Leonard D. White dalam *Introduction to the Study of Public Administration* (1926) dan para akademisi lainnya mulai berupaya mengukuhkan administrasi sebagai disiplin ilmu yang mandiri dan terpisah dari ilmu politik. Suatu bidang dapat dikategorikan sebagai ilmu apabila memiliki lokus (ruang lingkup kajian) serta fokus yang jelas (spesifikasi keilmuannya). Pemisahan administrasi dari ilmu politik didasarkan pada perbedaan fundamental antara kedua disiplin tersebut, baik dari segi objek kajian maupun pendekatan yang digunakan.

Pada masa itu, jurusan Ilmu Politik di Amerika menjadi wadah yang ideal untuk menyiapkan tenaga ahli di bidang pemerintahan serta membekali aparatur negara dengan keterampilan yang diperlukan. Sejalan dengan hal tersebut, Frank J. Goodnow dalam karyanya *Politics and Administration* (1900) mengemukakan bahwa pemerintahan memiliki dua fungsi utama, yaitu politik yang bertugas merumuskan kebijakan atau mengekspresikan kehendak negara serta administrasi yang bertanggung jawab dalam

pelaksanaan kebijakan tersebut. Pemikiran Goodnow ini mendorong para pakar administrasi untuk lebih berfokus pada aspek administrasi negara, yang pada akhirnya melahirkan gerakan pelayanan publik atau *Public Service Movement*.

Dalam paradigma I perkembangan administrasi, politik dan administrasi dipisahkan secara tegas satu sama lain. Ini dikenal sebagai dikotomi administrasi-politik. Berdasarkan ide L.D. White (1926) dalam *Introduction to the Study of Public Administration*, Dwight Waldo (1955) kemudian menyampaikan pemikiran ini. White menekankan bahwa politik tidak boleh mengganggu administrasi karena manajemen adalah sesuatu yang ilmiah. Administrasi negara juga dianggap sebagai bidang yang dapat berkembang secara mandiri tanpa bergantung pada nilai-nilai tertentu; tujuan utamanya adalah untuk mencapai efisiensi dan ekonomi waktu. Namun, selama periode ini, para ahli administrasi hanya dapat menentukan lokus ilmu administrasi, yaitu birokrasi pemerintahan, dan fokus kajian administrasi masih tidak jelas. Meskipun demikian, administrasi mulai dibagi menjadi dua cabang utama: administrasi negara dan administrasi niaga.

Paradigma kedua dalam perkembangan ilmu administrasi berkaitan dengan Prinsip-prinsip Administrasi pada periode 1927-1937. T.W. Willoughby, melalui karyanya *Principle of Public Administration* yang terbit pada tahun 1927, memberikan kontribusi

signifikan dengan memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi yang bersifat ilmiah dan aplikatif bagi seorang administrator. Pada paradigma ini, fokus utama tidak terletak pada lokus administrasi negara, melainkan pada universalitas prinsip-prinsip administrasi yang diyakini dapat diterapkan di berbagai bentuk organisasi dan lingkungan sosial budaya yang berbeda.

Pada kurun waktu 1927-1937, administrasi publik berkembang dengan prinsip-prinsip yang terstruktur dan jelas. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa administrasi negara dapat diterapkan di berbagai negara, terlepas dari perbedaan budaya, lingkungan, maupun visi pemerintahan. Pada fase ini, administrasi publik mencapai puncak reputasinya, yang ditandai dengan semakin berkembangnya sistematika penulisan dalam bidang administrasi. Para ahli, seperti Gullick dan Urwick, memperkenalkan konsep administrasi yang sistematis melalui model POSDCORB, yang mencakup hal-hal seperti *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *staffing* (pengisian jabatan), *directing* (pengarahan), *planning* (pengorganisasian), *reporting* (pelaporan), dan *budgeting* (penganggaran). Pada titik ini, model ini menjadi landasan utama untuk praktik administrasi publik.

Paradigma ketiga dalam perkembangan Administrasi Negara sebagai bagian dari Ilmu Politik berlangsung pada periode 1950-1970. Kritik konseptual terhadap disiplin administrasi negara

mendorong kembalinya ilmu ini ke akar keilmuannya, yaitu ilmu politik. Meskipun demikian, para akademisi di bidang administrasi negara terus berupaya menjadikannya sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Pada tahun 1962, administrasi negara tidak lagi dikategorikan sebagai subbidang ilmu politik, sebagaimana tercantum dalam laporan Komite Ilmu Politik dari Perkumpulan Ilmu Politik Amerika. Hal ini memperkuat keyakinan para akademisi bahwa administrasi negara telah mencapai tahap untuk diakui sebagai bidang ilmu yang berdiri sendiri. Keyakinan tersebut semakin didukung oleh temuan penelitian terhadap artikel yang diterbitkan dalam jurnal Ilmu Politik sepanjang 1960-1970, yang menunjukkan bahwa hanya 4% dari keseluruhan artikel membahas ilmu politik, sedangkan sebagian besar lainnya berfokus pada administrasi negara. Dengan demikian, para akademisi memandang administrasi negara sebagai bagian dari ilmu administrasi yang termasuk dalam rumpun ilmu sosial.

Paradigma keempat, yaitu Administrasi Negara sebagai disiplin ilmu administrasi pada periode 1956–1970, ditandai dengan berkembangnya pemikiran para ahli dalam memperkaya kajian administrasi negara. Pada masa ini, mereka berupaya merumuskan dan menegaskan fokus utama dalam studi administrasi negara guna memperkuat kedudukannya sebagai suatu bidang ilmu yang sistematis. "Ilmu" adalah istilah yang mengacu pada kumpulan

pengetahuan atau pengalaman yang telah dikompilasi dan diuji validitasnya. Setiap ilmu harus memiliki fokus (objek), metodologi, terminologi, filosofi, dan teori-teori sendiri.

Sedangkan dalam pemahaman yang moderat, ilmu pengetahuan memiliki karakteristik berupa kumpulan proposisi atau pernyataan yang dapat diuji serta merujuk pada realitas yang ada. Ilmu bersifat terbuka terhadap kritik rasional yang dapat berfungsi untuk mengonfirmasi, memperbaiki, atau membantah kebenarannya. Oleh karena itu, pengetahuan dapat diklasifikasikan sebagai ilmu jika :

1. Pengetahuan memiliki tujuan dan objek yang jelas;
2. Sejauh memungkinkan, metode tertentu yang objektif dapat digunakan untuk menganalisis tujuan atau tujuan tersebut;
3. Pengetahuan bersifat sistematis, sehingga dalam strukturnya tidak terdapat unsur-unsur yang saling bertentangan;
4. Seluruh kriteria di atas dapat dipenuhi oleh ilmu administrasi sebagai suatu disiplin keilmuan. Ilmu administrasi berfokus pada administrasi itu sendiri, dengan titik perhatian utama pada teori organisasi dan manajemen.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ilmu administrasi sebanding dengan pendekatan yang digunakan dalam

bidang ilmu sosial lainnya, seperti analisis, identifikasi, dan penelitian. Namun, ilmu administrasi juga memiliki metode unik yang tidak ditemukan di bidang lain, seperti analisis tugas pekerjaan dan metode organisasi dan prosedur. Semakin sistematisasi ilmu ini seiring waktu.

Dari segi lokus, ilmu administrasi dapat diterapkan di berbagai institusi yang ada, tanpa terbatas pada domain tertentu. Pada tahun 1960, disiplin ini berkembang menuju aspek pengembangan organisasi, dengan fokus utama pada administrasi yang menitikberatkan kajian psikologi sosial serta demokrasi birokrasi, baik dalam sektor publik maupun swasta.

Paradigma kelima dalam perkembangan Administrasi Negara, yang muncul pada tahun 1970, menempatkan Administrasi Negara sebagai disiplin ilmu yang berfokus pada teori organisasi dan manajemen. Saat ini, fokus utama tertuju pada proses pengambilan keputusan, mekanisme kerja organisasi, dan alasan tindakan individu dalam organisasi. Administrasi negara bukan lagi sekadar praktik administratif; sekarang adalah studi ilmiah yang mencakup teori organisasi, ekonomi politik, dan ilmu kebijakan (policy science).

Administrasi negara semakin menunjukkan bahwa akademik adalah bidang studi yang independen. Ada banyak departemen, fakultas,

dan akademi yang berfokus pada administrasi negara dan hal-hal publik sebagai hasilnya. Pembentukan asosiasi nasional yang menaungi fakultas-fakultas terkait, The National Association of School of Public Affairs and Administration, adalah salah satu bukti penting dari perkembangan disiplin ini. Pada tahun 1980, asosiasi ini memiliki lebih dari 200 lembaga anggota dan memiliki lebih dari 25.000 siswa, baik penuh waktu maupun paruh waktu, yang telah mengikuti program Master of Public Administration (MPA) sejak akhir tahun 1970-an.

Paradigma keenam yaitu merupakan paradigma Governance atau 1990-Sekarang. Paradigma keenam merupakan paradigma terbaru dalam evolusi ilmu administrasi publik yang terbentuk melalui serangkaian paradigma sebelumnya. Dalam karyanya *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Pandji Santosa menjelaskan bahwa paradigma ini bertumpu pada tiga pilar utama, yakni pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Perbedaan mendasar dari paradigma ini terletak pada pergeseran fokus dari konsep *government* sebagai entitas penyelenggara pemerintahan menuju konsep *governance*, yang menekankan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*). Pergeseran ini mencerminkan transformasi dalam administrasi publik yang mengarah pada praktik pemerintahan yang lebih baik

(*good governance*), dengan menekankan stabilitas serta sinergi antara ketiga elemen tersebut.

1.5.4 Manajemen Publik

Manajemen public dikenal sebagai manajemen pemerintahan, Pemerintah melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Ini disebut manajemen publik, juga disebut manajemen pemerintahan. Saat ini, komponen manajemen menjadi sangat penting dalam manajemen perusahaan, baik di sektor swasta maupun publik, termasuk lembaga pemerintah. Meskipun ide-ide dari manajemen sektor swasta diambil dari manajemen sektor publik, orientasi tujuan dan pelaksanaannya tidak serta-merta sebanding dengan manajemen sektor swasta. Menurut Overman (1984:1), manajemen publik merupakan kajian interdisipliner yang menelaah aspek-aspek umum dalam organisasi. Disiplin ini merupakan perpaduan antara perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam manajemen, yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, serta sumber daya politik. Dengan demikian, manajemen publik dapat dipahami sebagai suatu ilmu yang berfokus pada bagaimana mengarahkan, memimpin, dan mengelola individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dengan orientasi utama pada pelayanan kepada masyarakat.

1.5.5 Strategis

Strategi adalah suatu pendekatan menyeluruh untuk menerapkan ide, merencanakan, dan melakukan sesuatu dalam jangka waktu tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu dalam memanfaatkan seluruh sumber daya suatu negara untuk mencapai kebijakan tertentu melalui perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan tertentu. Coulter menjelaskan bahwa strategi adalah kumpulan tindakan dan keputusan yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka melakukan ini dengan menyesuaikan sumber daya organisasi untuk menanggapi peluang dan tantangan lingkungan luar. Namun, menurut Bryson, strategi merujuk pada pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, dan distribusi sumber daya yang menggambarkan identitas organisasi, aktivitas yang dilakukan, dan alasan mengapa aktivitas tersebut dilakukan.

Marrus, yang dikutip oleh Umar (2001:31), mengatakan bahwa strategi adalah proses membuat rencana untuk mencapai tujuan yang akan datang. Strategi atau langkah-langkah dapat dibuat untuk mencapai tujuan. Menurut Wheelen dan Hunger (2008), strategi juga merupakan kumpulan keputusan yang digunakan di semua unit fungsional perusahaan. Untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi, tahap perumusan (*formulating*), implementasi

(implementing), dan evaluasi diperlukan.

Agar manajemen puncak dan seluruh anggota perusahaan dapat memperbarui diri, strategi harus dapat menyampaikan informasi dengan jelas kepada setiap pembaca. Oleh karena itu, menurut Donnelly dalam Salusu (2004:109), enam komponen informasi harus ada dalam suatu strategi: (1) rencana yang akan dilaksanakan; (2) alasan untuk memilih strategi tersebut; (3) orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya; (4) perkiraan biaya yang diperlukan untuk keberhasilannya; (5) waktu yang diperlukan untuk melaksanakannya; dan (6) hasil yang diharapkan dari pelaksanaannya.

Higgins (1985), sebagaimana dikutip oleh Wheelan dan Hunger (2008: 11), menggambarkan implementasi sebagai kumpulan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya manusia untuk memanfaatkan sumber daya lain untuk mencapai tujuan strategis. Dalam tahap implementasi strategi, suatu organisasi menerapkan strategi dan kebijakannya ke dalam kehidupan nyata melalui pembuatan program, alokasi anggaran, dan penetapan prosedur. Tahap implementasi strategi terdiri dari: (1) Program, yang merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang diperlukan untuk merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan; (2) Anggaran, yang merupakan penetapan program dalam bentuk satuan finansial; dan (3) Implementasi prosedur,

1.5.6 Manajemen Strategi

Nawawi (2013:149) mengemukakan bahwa manajemen strategik merupakan suatu bentuk perencanaan berskala luas yang berorientasi pada masa depan (visi). Dalam prosesnya, keputusan strategis ditetapkan oleh manajemen tingkat tertinggi, sehingga bersifat fundamental dan tidak dapat diubah. Perencanaan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan organisasi (misi), terutama dalam menghasilkan produk, jasa, serta layanan yang berkualitas melalui optimalisasi pencapaian strategis serta sasaran organisasi (tujuan operasional).

Sementara itu, Fred R. David menggambarkan manajemen strategi sebagai seni dan disiplin ilmu yang merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Bambang Hariadi (2003), manajemen strategi terdiri dari langkah-langkah yang sistematis, termasuk perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi implementasi strategi. Secara keseluruhan, proses ini bertujuan untuk meningkatkan visi dan misi organisasi sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik.

1.5.7 Perencanaan Strategis

Bryson (2007) mendefinisikan perencanaan strategis sebagai upaya yang didisiplinkan guna membuat keputusan dan tindakan

penting yang dapat membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengappa organisasi mengerjakan hal tersebut. Sementara George A dan John B. Miner (1997) mengemukakan definisi perencanaanstrategik sebagai proses pemilihan berbagai tujuan dalam organisasi; menentukan strategi; kebijakan dan berbagai program strategik yang dibutuhkan guna menjalankan tujuan; serta menetapkan metoda yang diperlukan guna memberikan jaminan strategi dan kebijaksanaan telah berjalan.

Dalam definisi lain Perencanaan strategis adalah suatu proses oleh organisasi guna menentukan strategi ataupun arahan, serta dalam pengambilan keputusan dalam mengalokasikan sumberdayanya yang berupa modal dan sumber daya manusia untuk mencapai strategi. Berbagai teknik analisis bisnis yang dapat digunakan dalam proses perencanaan strategis meliputi analisis SWOT yaitu Strengths (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman), PEST yaitu Political (politik), Economic (ekonomi), Social (sosial), dan Technological (teknologi), atau STEER yaitu Socio-cultural (kultur sosial), Technological (teknologi), Economic (ekonomi), Ecological (ekologi), dan Regulatory (peraturan).

Dalam penelitian ini adapun peneliti menggunakan perencanaan strategisyang dikemukakan oleh John M. Bryson

(2007). Model perencanaan dan manajemen strategi ini yang dalam suatu organisasi menyajikan suatu sudut pandang yang lebih beraneka ragam. Dimana titik awal model perencanaan Bryson ini muncul akibat adanya perbedaan antara rasionalitas politik dengan rasionalitas ekonomi neoklasik (John M. Bryson, 2016). Adapun langkah strategi yang dikemukakan Bryson (2007) guna mencegah terjadinya perubahan dalam suatu organisasi yang dapat meliputi:

1. Memrakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis Bertujuan untuk melakukan negosiasi kesepakatan dengan pembuat keputusan atau pembuat opini baik internal maupun eksternal mengenai segala upaya perencanaan strategis dan langkah perencanaan. Dalam kesepakatan ini harus meliputi tujuan perencanaan; langkah-langkah dalam proses; bentuk dan jadwal pembuat laporan; peran, fungsi, dan anggota perencana strategis; serta komitmen SDM dalam keberhasilan perencanaan strategis.
2. Memperjelas mandat organisasi Mandat dalam suatu organisasi merupakan suatu ketetapan dalam legislasi atau UU yang menjadi dasar yuridis dalam keberadaan suatu organisasi publik. Dalam suatu perencanaan strategis memahami mandat diperlukan guna menghindari terjadinya penyimpangan dalam pengambilan keputusan.
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi Misi dalam suatu organisasi merupakan pernyataan yang berisimengenai tujuan

organisasi kedepannya yang hendak diwujudkan dalam bentuk program ataupun pelayanan. Misi memiliki kegunaan dalam memberikan alasan mengenai dibentuknya suatu organisasi dan juga tujuan yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Sementara nilai-nilai organisasi berkaitan dengan suatu hal yang dapat diukur yang dapat berisikan kebaikan ataupun kebenaran mengenai perilaku dalam organisasi sebagai budaya kerja yang penting diterapkan guna pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan, visi dan misi organisasi.

4. Penilaian lingkungan internal Lingkungan internal berisikan mengenai unsur-unsur di dalam organisasi yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan dan memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh manajer dalam suatu organisasi. Analisis terhadap lingkungan internal ini juga berkaitan dengan peluang beserta dengan ancaman yang dimiliki dan yang harus dihadapi dalam keberjalanan program yang dimiliki oleh suatu organisasi. Adapun analisis internal meliputi:

- a. Faktor Sumber Daya Manusia

Menurut Sulistiyani dan Rosidah (2003) sumber daya manusia merupakan potensi manusiawi yang berada pada diri seseorang yang dapat berupa potensi fisik ataupun non fisik. Sumber daya manusia dapat berupa 2 aspek yang meliputi aspek kualitas yang dapat berupa kemampuan baik fisik maupun nonfisik

(skill, pengalaman, kecerdasan, mental, dll) dan aspek kuantitas yang dapat berupa jumlah ketersediaan SDM pendukung keberhasilan pengembangan organisasi. (Ambar Teguh S, 2009)

b. Dana/Anggaran

Anggaran menurut Munandar (dalam Setyaningsih 2018) merupakan sebuah rencana yang telah dibuat dengan sistematis yang berupa keseluruhan rangkaian kegiatan dari suatu organisasi yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter dan memiliki jangka waktu periode tertentu yang akan datang. Lebih lanjut Keban (2002) juga menyatakan bahwa ketersediaan anggaran penting guna mendukung tugas serta fungsi dari organisasi dengan memanfaatkannya secara efisien. Dana/anggaran penting ketersediaannya salah satu syarat mutlak dalam menjalankan berbagai program dan aktivitas organisasi. (Setyaningsih, 2018)

c. Sarana Prasarana

Sarana wisata menurut Suwanto (dalam Prastiwi, 2021: 48) merupakan kecukupan wilayah tujuan wisata guna memberikan pelayanan akan kebutuhan para wisatawanannya dalam keberjalanan wisata. Sementara prasarana wisata yang juga dikemukakan oleh Suwanto (dalam Prastiwi, 2021: 52) merupakan seluruh fasilitas utama atau dasar baik yang berasal dari sumberdaya alam ataupun sumberdaya buatan yang

dibutuhkan untuk memberikan pelayanan bagi para wisatawan ketika melakukan kegiatan wisata. Sarana dan Prasarana dapat diartikan berupa segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam pencapaian tujuan dalam suatu organisasi. Dimana organisasi memerlukan sarana prasaran guna mendukung dan memperlancar seluruh aktivitasnya. (Prastiwi, 2021)

5. Penilaian lingkungan eksternal Lingkungan eksternal berisikan mengenai unsur-unsur di luar organisasi yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan dan memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh manajer dalam suatu organisasi. Penilaian lingkungan eksternal juga berkaitan dengan melakukan identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan beserta aspek-aspek yang dapat membantu atau menghalangi pelaksanaan dalam mencapai misi dan mandatorganisasi. Adapun penilaian lingkungan eksternal dapat dilakukan pada:

- a. Aspek politik

Salusu (dalam Sihabudin, 2019: 287) menguraikan bahwa dalam mengimplementasikan manajemen strategis, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan ruang lingkup beserta misi organisasi merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Aspek tersebut perlu perhatian tidak hanya di tingkat lokalnya saja tetapi juga di tingkat nasional,

hingga tingkat global atau menyeluruh. Hal ini berkaitan dengan apabila terjadi perubahan situasi politik pada suatu wilayah tentu akan memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan organisasi pada wilayah tersebut. Dengan demikian diperlukan perhatian terhadap situasi politik yang tengah terjadi untuk menyesuaikan kegiatan dan kebijakan organisasi sesuai dengan kondisi perkembangan politik yang tengah terjadi. (Sihabudin, 2019)

b. Aspek ekonomi

Siagian (dalam Sihabudin, 2019: 287) mengemukakan bahwa faktor ekonomi memiliki keterkaitan dengan pengembangan pada suatu organisasi. Kajian ekonomi yang mendalam diperlukan guna mengembangkan strategi yang akan diwujudkan. (Sihabudin, 2019)

c. Aspek sosial

Mardiasmo (dalam Sihabudin, 2019: 287) mengemukakan bahwa terdapat faktor sosial yang penting yaitu keragaman suku, ras, agama, pertumbuhan penduduk dan tingkat pendidikan masyarakat. Sementara budaya berkaitan dengan kebiasaan, tradisi, nilai-nilai kehidupan masyarakat sekitar yang sudah melekat dan sulit untuk diubah. (Sihabudin, 2019) Daliyo (dalam Fernando, 2016:4) kondisi budaya pada suatu masyarakat pada satu wilayah ialah faktor penting dalam

menunjang keberjalanan pengembangan wisata. Aspek sosial ini berpengaruh terhadap masyarakat secara signifikan terhadap jalannya organisasi dan harus didasari dalam setiap pengambilan keputusan. (Fernando, 2016)

d. Aspek teknologi

Pearce dan Robinson (dalam Sihabudin, 2019: 287) mengemukakan pentingnya bagi organisasi untuk mencermati perkembangan teknologi agar dapat terhindar dari kekurangan dan memberikan dorongan motivasi. Adaptasi teknologi akan menjadikan terciptanya produk baru maupun dapat memperbaiki prosedur pelayanan. Aspek teknologi merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Teknologi dalam hal ini meliputi perkembangan sistem komunikasi yang mampu diakses oleh pemerintah daerah, jaringan jalan, sarana transportasi, dan perkembangan teknologi serta penggunaannya dalam menunjang perumusan kebijakan atau strategi pengembangan. (Sihabudin, 2019)

e. Partisipasi Masyarakat

Pitana (dalam Palimbunga, 2017: 18) mendefinisikan partisipasi masyarakat tidak hanya tentang kontribusi tenaga, waktu, dan materi lokal secara cumacuma, guna memberikan dukungan atas program dan kegiatan pembangunan tetapi juga dalam

keterlibatan secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan.
(Palimbunga, 2017)

f. Keterlibatan Stakeholders

Freeman (dalam Fairuza, dkk 2017: 9) menuturkan pengertian stakeholder sebagai beberapa kelompok atau individu yang memiliki pengaruh atau dipengaruhi oleh adanya capaian dari keberjalanan tujuan suatu organisasi. (Fairuza, 2017)

1.5.8 Analisis SWOT

Penelitian kualitatif dapat dilaksanakan melalui beragam pendekatan, salah satunya dengan memanfaatkan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats). Analisis SWOT merupakan teknik pelaksanaan rencana strategi guna melakukan evaluasi kekuatan dan peluang, sekaligus meminimalkan kelemahan serta ancaman. Melansir pada (Bryson, 1999: 142), terdapat keuntungan dari analisis SWOT sebagai berikut:

1. Ketersediaan untuk memusatkan perhatian pada berbagai isu strategis esensial yang timbul dari konvergensi tugas, misi, kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman organisasi.
2. Menyokong tim perencanaan melakukan implementasi strategi efektif untuk mengatasi beberapa isu strategis.

Menurut Ahmad (2020: 57), komponen SWOT antara lain:

1. Kekuatan (*strength*) ialah situasi maupun kondisi di mana mewakili kekuatan suatu organisasi maupun program terkini.
2. Kelemahan (*weakness*) ialah situasi maupun kondisi di mana mewakili kekurangan suatu organisasi maupun program terkini.
3. Peluang (*oppourtunity*) ialah situasi maupun kondisi di mana mewakili peluang pada luar organisasi serta memberikan peluang untuk perusahaan dalam berkembang pada masa akan mendatang.
4. Ancaman (*threats*) ialah suatu keadaan yang merupakan ancaman terhadap suatu organisasi, berasal dari luar organisasi serta mampu membahayakan kelangsungan hidup organisasi pada masa akan mendatang.

Menurut Isnati dan Rizki (2019: 55), terdapat tujuan analisis SWOT yakni guna memberikan ilustrasi hasil analisis secara komprehensif terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman suatu perusahaan, serta berfungsi sebagai pengganti landasan.

Tindakan yang harus diambil untuk seleksi alat analisis ini dipergunakan guna melakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan yang ada. Sebab karena itu, dipelajari dengan tepat pada lingkungan internal ataupun eksternal serta membantu menjawab pertanyaan dengan hasil dalam waktu yang cenderung singkat. Menggunakan analisis

SWOT yang mana lebih memudahkan dengan adanya bantuan matriks SWOT. Matriks SWOT akan menolong pada saat perumusan beragam strategi serta hal ini diharap mampu mempergunakan kekuatan yang ada untuk melakukan reduksi kekurangan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi ancaman pada organisasi.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Isniati dan Rizki (2019:62), matriks SWOT berfungsi sebagai alat analisis yang menghimpun berbagai faktor strategis dalam suatu organisasi atau perusahaan. Alat ini secara eksplisit menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan serta kelemahan organisasi atau perusahaan. Melalui matriks ini, dapat dihasilkan empat kemungkinan strategi alternatif, yakni:

1. Strategi SO (*Strength-Opportunities*) Strategi yang diterapkan didasarkan pada cara berpikir organisasi, yaitu pemanfaatan peluang secara penuh.
2. Strategi ST (*Strenghts-Threats*) Strategi yang bertujuan mempergunakan kekuatan perusahaan dalam melakukan pengatasan ancaman yang dirasakan.
3. Strategi WO (*Weaknesses- Opportunities*) Strategi ini dilaksanakan atas dasar pemanfaatan kesempatan yang ada, melakukan meminimalisir pada kekurangan yang ada.

4. Strategi WT (*Weaknesses- Threats*) Strategi ini diimplementasikan pada operasi pertahanan serta bertujuan dalam melakukan meminimalisir kekurangan yang ada maupun melakukan penghindaran ancaman.

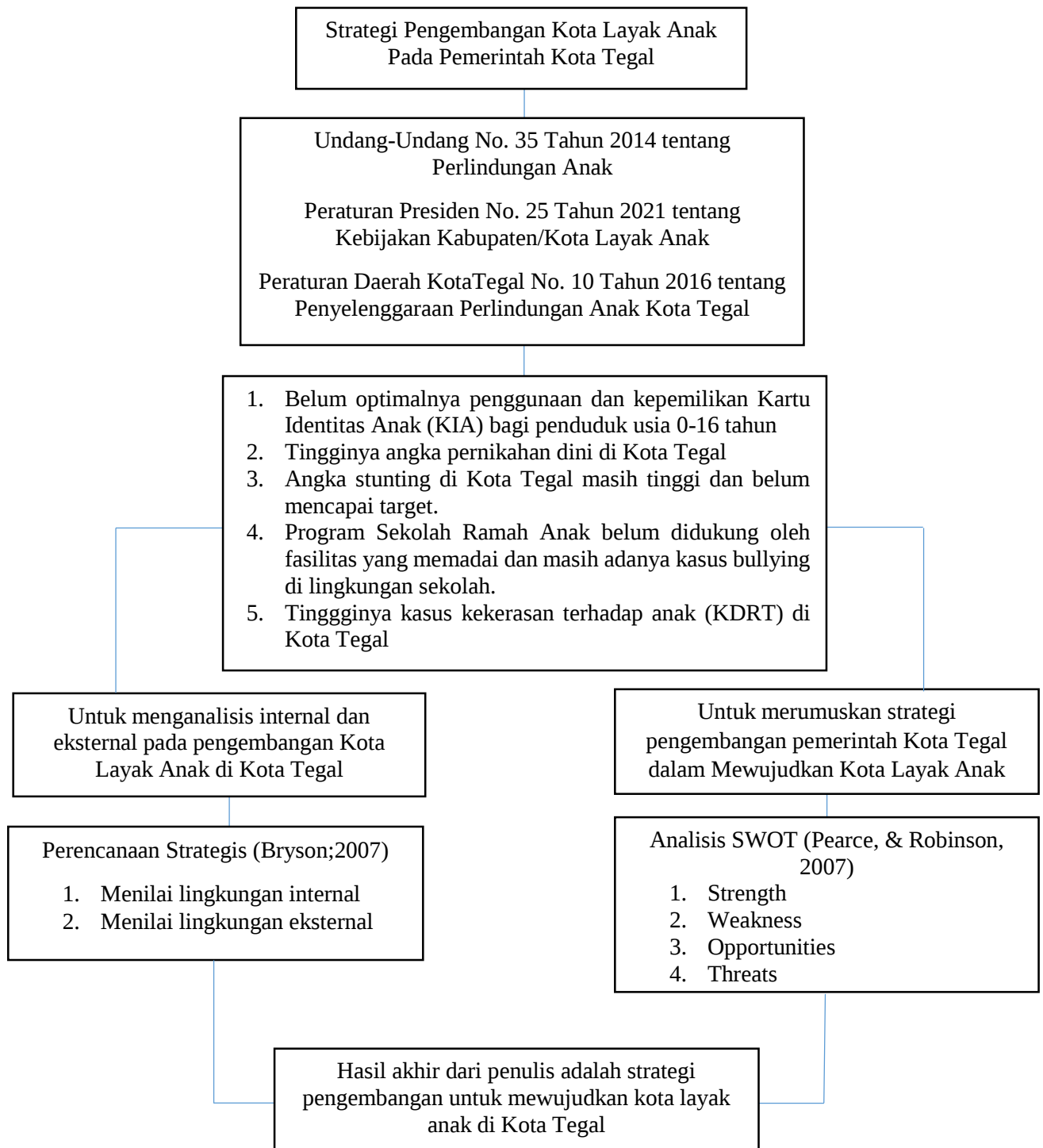
1.5.9 Perlindungan Anak

Anak merupakan titipan sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga dengan penuh tanggung jawab, mengingat dalam dirinya terkandung harkat, martabat, serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Hak asasi manusia termasuk hak asasi anak, yang ditujukan khusus untuk anak-anak. Anak, termasuk wanita hamil, didefinisikan secara hukum sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun.

Dalam praktiknya, partisipasi anak masih aktif dan memiliki kemampuan untuk mengungkapkan pendapat, keinginan, dan kebutuhan mereka secara verbal biasanya menunjukkan partisipasi aktif anak. Kemampuan ini biasanya mulai berkembang setelah enam tahun dan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Anak-anak juga dianggap sebagai cikal bakal generasi penerus yang bertanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan bangsa. Karena itu, mereka diharapkan dapat memikul tanggung jawab dan berkontribusi pada kemajuan bangsa di masa depan.

Dengan demikian, pembinaan generasi muda menjadi aspek krusial guna memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal ini bertujuan agar di masa depan mereka mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa serta menjalani kehidupan yang mandiri dan terampil. Kepribadian anak pada masa kini sangat menentukan kualitas kehidupan bangsa di kemudian hari. Semakin baik karakter yang dimiliki anak, semakin cerah pula prospek masa depan bangsa. Sebaliknya, jika kepribadian anak kurang baik, maka berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan bangsa di masa mendatang. Witanto (2012:4-6) menjelaskan bahwa anak merupakan individu yang memiliki karakteristik khas dalam kehidupannya. Selain memerlukan bimbingan orang tua dalam proses tumbuh kembangnya, faktor lingkungan juga memegang peran penting dalam membentuk kepribadiannya hingga ia memasuki fase kedewasaan. Negara harus melindungi anak-anak dari tindakan yang dapat membahayakan masa depannya karena anak-anak akan memikul tanggung jawab besar sebagai generasi penerus.

1.6 Kerangka Berpikir



Gambar 1.1

Kerangka Berpikir

1.7 Kerangka Berpikir

1.7.1 Perencanaan Strategis

Strategi perencanaan berfokus pada masa depan. Untuk membantu membentuk dan membimbing apa yang diharapkan oleh manajemen, apa yang harus dilakukan, dan mengapa itu dilakukan, perumusan strategi memerlukan upaya yang ketat. Menurut Bryson (2007), perencanaan strategis didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan mengarahkan bagaimana suatu organisasi atau entitas lainnya beroperasi dan mengapa mereka melakukannya..

Tabel 1.4

Perencanaan Strategi

Faktor	Gejala	Sub Gejala
Perencanaan Strategi	Lingkungan Internal	Visi Misi
		Sumber Daya Manusia
		Sarana dan Prasarana Anggaran
	Lingkungan Eksternal	Ekonomi
		Politik
		Sosial Budaya
		Partisipasi Masyarakat
		Teknologi
		Stakeholder

1.7.2 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja suatu organisasi, proyek, atau bisnis. SWOT merupakan akronim dari Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman). Kekuatan dan kelemahan adalah faktor internal, seperti sumber daya, keunggulan kompetitif, atau keterbatasan organisasi, sedangkan peluang dan ancaman adalah faktor eksternal, seperti tren pasar atau persaingan industri (Rangkuti, 2015). Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang posisi strategis organisasi sehingga dapat membantu merumuskan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Pearce dan Robinson (2007), analisis SWOT adalah cara sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi organisasi serta mencocokkannya dengan strategi yang paling sesuai. Proses ini melibatkan pengelompokan kekuatan dan kelemahan sebagai elemen internal, sementara peluang dan ancaman diidentifikasi sebagai elemen eksternal. Oleh karena itu, analisis SWOT adalah alat penting untuk memahami bagaimana perusahaan dapat menggunakan kekuatan mereka untuk memanfaatkan peluang, mengatasi kelemahan, dan menghadapi ancaman.

Tabel
Analisis SWOT

1.5

STRENGTH	WEAKNESS
OPPORTUNITY	THREATS

1.8 Argument Penelitian

Strategi mengacu pada serangkaian keputusan dan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sambil menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang disajikan oleh lingkungan organisasi. Begitu pula dalam upaya Kota Tegal menjadi Kota Layak Anak, pemerintah telah menerapkan berbagai strategi. Namun, masih banyak strategi yang belum berhasil dijalankan sebagai bagian dari program ini. Menurut Bryson, strategi mencakup pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang menentukan identitas, aktivitas, dan tujuan organisasi. Judul yang dipilih mencerminkan maksud peneliti untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pemerintah dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Tegal. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta

merumuskan strategi pembangunan yang efektif. Tujuannya untuk memberikan wawasan yang dapat membuat pemerintah Kota Tegal sukses mencapai status Kota Layak Anak.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini akan melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah perspektif peneliti tentang peristiwa yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam kondisi tertentu dan untuk memahami dan menafsirkan makna peristiwa tersebut (Gunawan, 2013). Fokus utama penelitian adalah perumusan kebijakan, implementasi program, evaluasi program, dan penemuan kendala dalam pengembangan Kota Layak Anak di Kota Tegal. Pemilihan teknik ini dilakukan dalam upaya mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang subjek penelitian karena data kualitatif menurut Noeng Muhadjir melibatkan informasi yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal, kalimat, skema, atau gambar (Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rakesarasin, 1996, hal.2).

Metode penelitian mengacu pada pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisis,

dan mendapatkan jawaban atas masalah penelitian. Penelitian kualitatif menurut Noeng Muhadjir mendalami fenomena sosial atau lingkungan sosial yang mencakup aktor, peristiwa, tempat, dan waktu (Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rakesarasin, 1996, hlm. 2). Penelitian Deskriptif Kualitatif secara khusus menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang ada, menggambarkan realitas di lapangan melalui berbagai fenomena yang digali dari data dan informasi yang dijadikan landasan pendeskripsian secara komprehensif. Metodologi Penelitian Deskriptif Kualitatif berakar pada tinjauan pustaka, yang selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif sesuai dengan permasalahan penelitian. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman mendalam dan penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan materi yang diperiksa.

1.9.2 Situs Penelitian

Penulis telah memilih untuk melakukan penelitian ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tegal karena lembaga tersebut bertanggung jawab atas pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di kota tersebut.

1.9.3 Subjek Penelitian

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tegal
2. Kepala UPT PPA

3. Kepala Puskesmas Tegal Barat
4. Ketua Puspaga
5. Guru BK SMA N 5 Tegal
6. Ketua FANTRI
7. Masyarakat

1.9.4 Jenis & Sumber Data

1. Data Primer

Iskandar (2008:252) menyatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan responden. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan responden untuk memperoleh pemahaman mengenai kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Tegal, khususnya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam upaya mengembangkan Kota Layak Anak.

2. Data Sekunder

Berdasarkan pendapat Iskandar (2008:253), data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh melalui proses pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat dokumentatif. Data ini dapat berasal dari analisis dokumen pribadi, arsip resmi kelembagaan, referensi akademik, dan peraturan tertulis yang relevan dengan masalah penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Tegal serta literatur dari perpustakaan yang memberikan teori-teori yang relevan, serta peraturan yang berkaitan dengan topik penelitian..

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data selama penyusunan penulisan:

1. Observasi

Pasolong menyatakan bahwa observasi adalah proses pengamatan fenomena yang menjadi subjek penelitian secara langsung dan sistematis. Jika data yang diperoleh melalui metode ini selaras dengan tujuan dan rancangan penelitian dan dicatat secara sistematis untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya, maka data tersebut dianggap valid. Pengamatan lapangan langsung digunakan untuk mengumpulkan data tentang program dan kebijakan pemenuhan hak anak yang berkaitan dengan pembangunan Kota Layak Anak di Kota Tegal.

2. Wawancara

Wawancara merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menelusuri data melalui interaksi langsung antara pewawancara dan narasumber. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan sejumlah pelaksana pengembangan Kota Layak Anak di Kota Tegal, guna

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kualitas pelayanan serta tingkat kepuasan masyarakat. Metode yang digunakan adalah wawancara terbuka, yang berfungsi sebagai pelengkap dan penguat terhadap data yang telah diperoleh melalui kuesioner. Pengumpulan data dilakukan melalui sesi tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan relevan terkait permasalahan yang diteliti. Proses wawancara ini disusun secara sistematis berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhan data dan informasi penelitian.

3. Studi Pustaka

Salah satu metode pengumpulan data yang paling umum digunakan oleh para peneliti adalah studi pustaka. Studi pustaka mengumpulkan data yang relevan atau sesuai untuk penelitian dari sumber seperti buku, artikel ilmiah, berita, dan sumber lain yang dapat diandalkan. Data harus relevan dengan topik Strategi Pengembangan Kota Layak Anak Pada Pemerintah Kota Tegal.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan melalui teknik yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, langkah selanjutnya

adalah mengelompokkan serta mengolah data sesuai dengan kategorinya. Data yang telah diorganisir kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu metode analisis yang bertujuan untuk menyajikan gambaran rinci berdasarkan fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Hasil analisis ini akan disajikan secara sistematis, disertai dengan penjelasan serta informasi pendukung guna memperoleh kesimpulan yang valid. Pada tahap awal, proses deskripsi dilakukan dengan menguraikan fenomena yang diamati secara menyeluruh dalam lingkup aspek yang diteliti, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi aktual. Identifikasi fenomena tersebut tidak hanya berfokus pada distribusinya, tetapi juga mencakup analisis hubungan antara berbagai aspek yang berkaitan dalam penelitian ini.

Dalam proses analisis data kualitatif, untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian, pemahaman mendalam tentang cara menafsirkan teks dan gambar diperlukan selama proses analisis data kualitatif. Ada enam langkah yang dapat digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data kualitatif, yang dibahas dalam bab ini. Creswell (2010) menyatakan bahwa analisis data terdiri dari beberapa langkah sistematis.

, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Langkah pertama dalam proses ini adalah menyiapkan dan mengorganisir data yang akan dianalisis. Proses ini mencakup transkripsi wawancara, pemindaian materi, pemahaman terhadap data lapangan, serta pengelompokan dan penyusunan data ke dalam kategori-kategori yang berbeda berdasarkan sumber informasi yang diperoleh
2. Mengeskplorasi dan pengkodean data. Pada tahap ini, menulis catatan khusus atau gagasan umum tentang data yang diperoleh.
3. Menganalisis lebih detail dengan mengkoding data, yang merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi bagian-bagian tulisan sebelum memaknainya.
4. Menerapkan teknik koding untuk menentukan lingkungan, orang-orang, kategori, dan tema yang akan dianalisis.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan digunakan dalam cerita atau laporan kualitatif
6. Memvalidasi keakuratan hasil penelitian

1.9.7 Kualitas Data

Sugiyono (2013:267) menjelaskan bahwa validitas data merujuk pada sejauh mana kesesuaian antara data yang ada pada subjek penelitian dengan data yang dapat disajikan oleh peneliti. Penjelasan lebih rinci mengenai validitas data dalam penelitian dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan berikut:

1. Memperpanjang Pengamatan

Perpanjangan durasi pengamatan dapat memperkuat tingkat kepercayaan atau kredibilitas data yang diperoleh. Hal ini berarti bahwa peneliti kembali ke lokasi penelitian untuk melanjutkan pengamatan, baik terhadap sumber data yang sudah ditemui sebelumnya maupun sumber data yang baru ditemukan.

2. Triangulasi

Triangulasi merujuk pada proses verifikasi data yang melibatkan berbagai sumber, metode, dan waktu, yang dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber, yang bertujuan untuk memastikan validitas data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber atau informan.
- b. Triangulasi waktu, di mana data dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan di pagi hari ketika narasumber berada dalam kondisi segar, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan kredibel.
- c. Triangulasi teknik, digunakan untuk memvalidasi data dengan cara memeriksa informasi yang sama menggunakan teknik yang berbeda pada sumber yang sama.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber

3. Membercheck

Proses pengecekan data yang diberikan oleh pemberi data oleh peneliti dikenal sebagai member check. Tujuan dari pengecekan ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diterima oleh peneliti sesuai dengan yang diberikan oleh pemberi data..

4. Peningkatkan Ketekunan

Peningkatan ketekunan dapat dicapai melalui observasi yang lebih teliti dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, data yang diperoleh serta urutan kejadian dapat dicatat dengan akurat dan terstruktur secara sistematis.

5. Diskusi Teman Sejawat

Peneliti melakukan sesi diskusi dengan rekan sejawat untuk meningkatkan validitas data yang diperoleh. Diskusi ini dilakukan bersama rekan yang memiliki bimbingan yang sama, bertujuan untuk memperdalam pemahaman terhadap data yang telah terkumpul.

